

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Dokumen Lainnya

Adian, Donny Gahral. 2003. "Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia Pasca Bom Bali", *Analisis CSIS Tahun XXXII* (1): 78-88.

_____. 2011a. "Ancaman Baru, Perang Non Konvensional", *Jurnal Pertahanan Vol. 1* (1): 10-14.

_____. 2011b. 'Kita Tidak Dapat Hidup Tenang dan Aman Tanpa Intelijen', Kata Pengantar dalam A.M. Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Aminah, Siti. 2005. "Pilkada: Otonomi Elitis Vs Otonomi Rakyat", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Edisi 21 Tahun VI: 79-104.

Anggoro, Kusananto. 2002. 'Militer dan Transisi Menuju Demokrasi', dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

_____.2003. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum", *Makalah* pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 Juli.

_____.2004. 'Menakar Reformasi Sektor Keamanan Masa Pemerintahan Yudhoyono', dalam M. Najib Azca dan Moch. Faried Cahyono (ed), *Konflik dan Reformasi TNI di Era SBY*. Yogyakarta: CSPC Books.

_____.2005a. 'Konsolidasi Negara, Politik Transisi, dan Fungsi Intelijen', dalam Andi Widjajanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

_____.2005b. 'Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia', dalam Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS.

_____.2005c. 'Global Power, the Issue of Terrorism, and Democracy-Security Nexus', dalam Norbert Eschborn dan Henriette Litta (ed), *Democratization and the Issue of Terrorism in Indonesia*. Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

_____.2011. "Perang Asimetrik: Global, Regional, dan Nasional", *Preliminary Draft* untuk Seminar "Menjawab Tantangan Perkembangan Asymmetric Warfare di Kawasan Nasional, Regional, Internasional" Universitas Pertahanan Indonesia.

Anriani, Stepi. 2018. *Intelijen dan Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pilkada*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Aspinall, Edward. 2010. 'Semi-Opponents in Power: The Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri Presidencies', dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy (ed), *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU E Press.

Azca, M. Najib dan Cahyono, Moch. Faried. 2004. 'Pengantar Editor', dalam M. Najib Azca dan Moch. Faried Cahyono (ed), *Konflik dan Reformasi TNI di Era SBY*. Yogyakarta: CSPC Books.

Baker, Jacqui. 2015. 'Professionalism Without Reform: The Security Sector Under Yudhoyono', dalam Edward Aspinall, Marcus Mietzner, dan Dirk Tomsa (ed), *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS Publishing.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. 'Intelijen dan Keamanan Negara', dalam Andi Widjajanto (ed) *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

_____. 2006. "Intel Juga Manusia", *Kompas*, 7 September.

_____. 2011. "Intel Juga Manusia", *Seputar Indonesia*, 29 Maret

_____. 2014. "Reformasi Intelijen", *ELSAM* (<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Reformasi-Intelijen.pdf>), diakses 27 Maret 2018.

_____. dan Mengko, Diandra Megaputri. 2016. "Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 13 (1): 69-82.

_____. dkk. 2017. *Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Birkland, Thomas A. 2011. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: M.E. Sharpe.

Born, Hans dan Imobersteg, Stefan. 2009. *Komisi Intelijen*. Jakarta: IDSPS Press.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Ahmad. 2011. "Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara", *Kajian* Vol. 16 (2): 413-438.

Centre for Strategic and International Studies. 2012. *Mengkaji Kebijakan tentang Akses dan Informasi serta Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Belajar dari Singapura dan Filipina serta Rekomendasi Awal untuk DPR*. Jakarta: CSIS.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2016. "Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 (3): 552-574.

Daeli, Sorni Paskah. 2012. "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat", *Jurnal Bina Praja* Vol. 4 (1): 57-66.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara tanggal 22 Maret 2011.

Datta, Ajoy dkk. 2011. *The Political Economy Policy-Making in Indonesia: Opportunities for Improving the Demand for and Use of Knowledge*. London: Overseas Development Institute.

Dewan Perwakilan Rakyat-RI. 2011. *Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara*. Jakarta: DPR-RI.

Dini Dewi Heniarti. 2009. "Reformasi Intelijen", *Pikiran Rakyat*, 8 September

Djumala, Darmansjah. 2013. *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara tanggal 19 November 2010.

Edwin, Donni. 2006. "The Role of NGOs in Military Reform in Indonesia", *Tesis* pada Nanyang Technological University: Tidak Diterbitkan

ELSAM. 2011. *Kajian ELSAM atas RUU Intelijen Negara: Kritisasi atas Kembalinya Paradigma Represi dalam RUU Intelijen Negara*. Jakarta: ELSAM.

Falaakh, Mohammad Fajrul. 2005. 'Batas-Batas Yuridis dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen', dalam Andi Widjajanto (ed) *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

Fealy, Greg. 2015. 'The Politics of Yudhoyono: Majoritarian Democracy, Insecurity, and Vanity', dalam Edward Aspinall, Marcus Mietzner, dan Dirk Tomsa (ed), *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS Publishing

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ganie-Rochman, Meutia. 2002. 'Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Reformasi Sosial', dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

Gunawan, Aditya Batara. 2017. "Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru", *Jurnal Politik* Vol. 2 (2): 197-230.

Habibi, Muhtar. 2008. “Kebijakan Perburuhan Pasca Orde Baru: Pengadopsian Karakter Neo-Liberal Kebijakan Perburuhan 2000-2003 dan Proses Pembentukannya”, *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada: Tidak Diterbitkan.

Hadiwinata, Bob S. 2005. “Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 (1): 1-22.

_____. 2007. ‘Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis’, Kata Pengantar dalam Hans Born dan Ian Leigh (ed), *Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*. Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Haq, Saiful. 2008. “Reformasi Intelijen, Pengalaman Jerman”, *Harian IndoProgress*, 26 Mei (<http://www.indoprogress.com/2008/05/reformasi-intelijen-pengalaman-jerman/>).

Hamid, Usman. 2011. “Menimbang RUU Intelijen Negara”, *Kompas*, 31 Maret.

Haripin, Muhammad. 2012. “Reformasi Sektor Keamanan Indonesia Pasca Orde Baru: Pencapaian dan Prospek”, *Jurnal Pertahanan* Vol. 2 (2): 89-105.

Haripin, Muhammad. 2013. *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Haryanto. 2017. “Konfigurasi Elite dan Demokrasi: Aktor, Sumber Daya, dan Strategi Kontestasi”, *Prisma* Vol. 36 (1): 22-41.

Hasanah, Isti Nur. 2004. “Analisis Peran Stakeholder dalam Pembuatan Kebijakan: Studi Kasus Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan di Kabupaten Magelang”, *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada: Tidak Diterbitkan.

Hendropriyono, A.M. 2008. “Ide dan Praksis Neo-Nasionalisme Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”, *Jurnal Filsafat* Vol. 18 (1): 75-84.

_____. 2013a. *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

_____. 2013b. *Operasi Sandi Yudha: Menumpas Gerakan Klandestin*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hikmat, Mahi M. 2013. ‘Keamanan Nasional dan Aksesibilitas Publik’, dalam Muradi (ed), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Penerbit Dian Cipta.

Howlett, Michael. 2011. *Designing Public Policy: Principles and Instruments*. London: Routledge.

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: Refika Aditama.

Imawan, Riswandha. 1996. 'Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia', dalam Riza Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Indrakrista, Niti Bayu. 2015. "Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelijen Daerah dalam Logika Desentralisasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 19 (1): 53-64.

International Crisis Group. 2011. "Indonesia: Debate over a New Intelligence Bill", *Asia Briefing* 124: 1-19.

Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jebarus, Felix. 2012. "Kontestasi Makna Kebebasan Informasi", *Exposure – Journal of Advanced Communication* Vol. 2 (1): 270-292.

Jemadu, Aleksius (ed). 2007. *Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis – Pandangan Praktisi*. Jakarta: DCAF, Friedrich-Ebert Stiftung, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jones, Sidney. 2015. 'Yudhoyono's Legacy on Internal Security: Achievements and Missed Opportunities', dalam Edward Aspinall, Marcus Mietzner, dan Dirk Tomsa (ed), *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS Publishing.

Kamarudin. 2015. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", *Perspektif Hukum* Vol. 15 (2): 165-184.

Keliat, Makmur. 2005. 'Negara, Globalisasi, dan Intelijen', dalam Andi Widjajanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara. 2005. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis.

Kingsbury, Damien. 2008. 'Indonesia', dalam Anthony Stuart Farson (ed), *PSI Handbook of Global Security and Intelligence: National Approaches, Volume I: the America and Asia*. Westport, Conn: Praeger Security International.

Koalisi Advokasi untuk RUU Intelijen Negara. 2011. *Kertas Posisi Koalisi Advokasi untuk RUU Intelijen Negara*. Jakarta: Koalisi Advokasi untuk RUU Intelijen Negara.

Koch, Andrew. 2017. "National Security Policy Making: The Players", *The Institute for Global Leadership, Tufts University*, 9 Agustus (<http://www.tuftsgloballeadership.org/blog/national-security-policy-making-players-andrew-koch>).

Kristiadi, J. 2005. 'Demokrasi dan Strategi Keamanan Nasional yang Partisipatif', dalam Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS.

Kurniawati, Dewi. 2012. "Peran Strategis Kerjasama Intelijen ASEAN dalam Upaya Pencegahan Serangan Teroris di Indonesia: Studi Kasus Kegagalan Intelijen pada Bom Bali Pertama 12 Oktober 2002", *Tesis* pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Laporan Singkat Komisi I DPR RI: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkumham beserta jajaran dan Tim Inderdep Pembahasan RUU Intelijen Negara.

Lay, Cornelis. 2005. 'Menjaring Bayang-bayang: Dilema Pengawasan Intelijen dalam Masyarakat Demokratis' dalam Andi Widjajanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

_____. 2012. 'Mengenal Keamanan', dalam Hermawan Sulistyono (ed), *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta: Pensil-324 bekerjasama dengan Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani.

_____. 2017. "The Emerging of New Democratic Space: CSOs and Parliament in Post-Soeharto Indonesia", *PCD Journal* Vol. V (1): 1-24.

Legowo, T.A. 2005. 'Institusi-Institusi Politik dan Keamanan Nasional', dalam Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS.

Lele, Gabriel. 2004. 'Formulasi Kebijakan Sebagai Permainan Bahasa: Sebuah Pendekatan Postmodern', dalam Purwo Santoso, Hasrul Hanif, dan Rachmad Gustomy (ed), *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

_____. 2005. "Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global, Solusi Lokal", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 (1): 71-90.

Mahyudin, Emil. 2016. "Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terorisme di Indonesia: Suatu Pandangan", *Intermestic: Journal of International Studies* Vol. 1 (1): 23-35.

Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabir Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei a1.

Medeiros, Evan S. 2000. *United States-China Relations: Comparative Security and Foreign Policy Processes*. Washington D.C.: National Committee on U.S-China Relations.

Mietzner, Marcus. 2006. *The Politics of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Washington, D.C.: East-West Center Washington.

Muchsin dan Putra, Fadillah. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press.

Muhaimin, Yahya A. 2006. *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mulyono, Ignatius. 2010. "Kebijakan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011", *Makalah* disampaikan dalam Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, Bogor, 12-14 Oktober

Muradi. 2006. "Intelijen Negara dan Intelijen Keamanan: Perspektif Kepemimpinan Politik dan Efektivitas Koordinasi", dalam Andi Widjajanto (ed) *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies.

Mustikawati, Ingrid Galuh dkk. 2012. *Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: The Habibie Center.

Muzairi. 2014. "Pergeseran Sistem Kekuasaan dari Marxisme ke Hegemoni dan Politik Media", *Esensia* Vol. 12 (2): 213-228.

Naskah Pidato Ketua DPR-RI Pada Rapar Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011, 8 April 2011

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta; Elex Media Komputindo.

_____.2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____.2015. *Policy Making: Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurhidayati, Sri. 2013. "Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 17 (1): 58-71.

Nurtjahjo, Hendra. 1997. "Posisi Otoritas Legislatif Presiden dan DPR", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XXVII: 94-101.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

- Edwin Partogi dkk. 2006. *Bunuh Munir!*. Jakarta: KontraS.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2005. "Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 (1): 45-70.
- Prabowo, Agung. 2016. 'Ancaman Hibrida dalam Perjuangan Identitas', dalam Iswandi Syahputra (ed), *Perang Semesta: dalam Kajian Budaya dan Media*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, Budi. 2012. "Kajian Teoritik Karakter Kebijakan Publik", *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 1 (1): 1-9.
- Pratikno. 2008. "Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 12 (1): 1-19.
- Prayudi. 2003. 'TNI di Tengah Transisi Politik: Faktor Internal TNI dan Faktor Kepemimpinan Pemerintah Sipil', dalam Rahmad Budiaji (ed), *Beberapa Aspek Reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR-RI.
- Prihatono, T. Hari., dan Kasim, Yandry Kurniawan. 2006. 'Intelijen Pertahanan: Tinjauan Literatur dan Perspektif Historis Indonesia', dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies.
- Prihatono, T. Hari, (ed). 2006. *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*. Jakarta: Propatria Institute.
- Putuhena, M. Ilham F. 2013. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 (3): 375-395.
- Putra, Fadillah. 2012. 'Jebakan-Jebakan dalam Desentralisasi dan Partisipasi', dalam Happy Budi Febriasih (ed), *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012.
- Purwanto, Erwan Agus. 1997. "Kebijakan Otomotif di Indonesia 1966-1996: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 1 (2): 74-95.
- _____ dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- _____ dkk. 2015. *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rajab, Achmadudin. 2017. "Peran Penting Badan Keahlian DPR-RI dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 (2): 233-244.

Raharso, Sri. 2011. “Mengelola Pekerja Pengetahuan”, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 7 (1): 34-44.

Reporters Without Borders. 2003. *Press Freedom Index 2003: Cuba Second From Last, Just Ahead of North Korea*. Paris: RSF.

_____. 2006. *Press Freedom Index 2006: North Korea, Turkmenistan, Eritrea The Worst Violators of Press Freedom*. Paris: RSF.

_____. 2009. *Press Freedom Index 2009: Obama Effect in US, While Europe Continues to Recede Israel in Free Fall, Iran at Gates of Infernal Trio*. Paris: RSF.

Riansyah, Levi. 2012. ‘Membuka Jalan Partisipasi Kritis Melalui Demokrasi Deliberatif’, dalam Happy Budi Febriasih (ed), *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.

Right & Democracy Team. 2008. *Civil Society and Security Sector Reform in Indonesia: 1998-2006*. Canada: International Centre for Human Rights and Democratic Development.

Rijal, Fahrul, Madani, Muhlis dan Fatmawati. 2013. “Interaksi Antar Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara”, *Otoritas* Vol. III (2): 14-26.

Rinakit, Sukardi. 2005. *The Indonesian Military After The New Order*. Singapore: NIAS Press and Institute of Southeast Asian Studies.

Riskiyono, Joko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.

Sa’faat, Muchamad Ali. 2012. “Intelijen Negara Dalam Negara Hukum yang Demokratis”, disampaikan sebagai *keterangan ahli* dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Saifudin. 2009. “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU”, *Jurnal Hukum* Vol. 16 (Edisi Khusus): 95-117.

Santosa, Teguh dkk. 2009. *Komisi I: Senjata-Satelit-Diplomasi*. Jakarta: Suara Harapan Bangsa.

Saronto, Y. Wahyu dkk. 2008. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Multindo Mega Pratama.

Scarpello, Fabio. 2014. ‘Stifed Development: The SSR-Civil Society Organizations Community in Post-authoritarian Indonesia’, dalam Felix Heiduk (ed), *Security Sector Reform in Southeast Asia: From Policy to Practice*. London: Palgrave Macmillan UK.

Schneier, Edward V. 2009. "Reformasi and the Indonesia 'War on Terror': State, Military and Legislative-Executive Relations in an Emerging Democracy", *The Journal of Legislative Studies* Vol. 15 (2-3): 294-313.

Sebastian, Leonard C. 2003. 'The Indonesian Dilemma: How to Participate in the War on Terror Without Becoming a National Security State', dalam Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (ed), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies NTU.

Sekretariat Jenderal DPR RI. 2011. Summary Laporan Hasil Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI Ke Negara Amerika Serikat Tanggal 6-12 Mei 2011, 12 Mei.

Shulsky, Abram N., dan Schmitt, Gary J. 2002. *Silent Warfare: Understanding The World of Intelligence*. Washington D.C.: Brassey's.

Sinaga, Obsatar, Ramelan, Prayitno, dan Montratama, Ian. 2018. *Terorisme Kanan di Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sirajudin dkk. 2006. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Malang Corruption Watch dan Yappika.

Soesastro, Hadi. 2003. 'Introduction: Indonesia Under Megawati', dalam Hadi Soesastro, Anthony L. Smith dan Han Mui Ling (ed), *Governance in Indonesia: Challenges Facing the Megawati Presidency*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharko. 2004. "Mengurai dan Membangun Basis Legitimasi NGO/Ornop", *Jurnal Mandatory* Edisi I Tahun I.

Suhayati, Monika. 2010. "Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Negara Hukum* Vol. 1 (1): 47-70.

Sukarno, Irawan. 2011. *Aku 'Tiada' Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sulardi. 2013. "Mewujudkan Checks and Balances dalam Penyusunan Undang-Undang", *Jurnal MMH* Jilid 42 No. 2: 282-291.

Sulistio, Eko Budi dan Kagungan, Dian. 2012. "Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Bandarlampung", disampaikan sebagai makalah dalam Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012.

Suratman, Yosua Praditya. 2017. "Penggunaan Strategi Operasi Kontra Intelijen Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Siber Nasional", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 7 (2): 1-17.

Susanti, Bivitri dkk. 2007. *Bobot Berkurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan dan Konrad Adenauer Stiftung.

Sutanto, Trisno S. 2006. 'LSM dan Demokrasi', dalam Hamid Basyaib (ed), *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Freedom Institute dan Pustaka Alvabet.

Syafi'ie, M. 2011. "Pengaturan Intelijen Berjibun Problem", *T-Ras: Majalah Gratisan*, Edisi November-Desember

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.

Tempo. 2017. *Benny Moerdani: Yang Belum Terungkap*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Thontowi, Jawahir. 2009. *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*. Yogyakarta: Penerbit Leutika.

Tim Ahli Fraksi Partai Golkar DPR-RI. 2011. *Bahan Reses Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang III 2010-2011*. Jakarta: Fraksi Partai Golkar.

Tim KontraS. 2011a. *Intelijen: Menangkap Tanda Tak Cerdas!*. Jakarta: KontraS.

_____. 2011b. *#HAKASASI: Compang-camping Hak Asasi Sepanjang 2011*. Jakarta: KontraS.

Tobing, Fredy B.L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Valasek, Kristin. 2006. *Reformasi Sektor Keamanan dan Gender*. Jakarta: IDSPS.

von Luebke, Christian 2010. "The Politics of Reform: Political Scandals, Elite Resistance, and Presidential Leadership in Indonesia", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 1: 79-94.

Wibawa, Samodra. 2010. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibisono, Ali Abdullah. 2009. *Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara*. Jakarta: IDSPS Press.

Whittaker, Alan G., Smith, Frederick C., dan McKune, Elizabeth. 2008. *The National Security Policy Process: The National Security Council and Interagency System*. Washington, D.C.: Industrial College of the Armed Forces, National Defense University, U.S. Department of Defense.

Widjajanto, Andi. 2005. 'Intel Juga Manusia: Bisa Direformasi!', dalam Andi Widjajanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

_____. 2006. 'Penutup: Agenda Reformasi Intelijen', dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies.

_____. 2009. "Kegagalan Politik Legislasi Pertahanan 2004-2009", *Kompas*, 5 Oktober.

_____, Lay, Cornelis, dan Keliat, Makmur. 2006. *Intelijen: Velox et Exactus*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Society Studies dan Kemitraan.

_____ dan Wardhani, Artanti. 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

Widyatmadja, Josef P. 2005. *Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2010. "Dinamika Otonomi Daerah dalam Pengembangan Metode Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Yuridika* Vol. 25 (2): 128-150.

Wirawan, Hariyadi. 2005. 'Evolusi Intelijen Indonesia', dalam Andi Widjajanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Friedrich-Ebert Stiftung.

Wise, William M. 2005. *Indonesia's War on Terror*. Washington D.C.: United States-Indonesia Society.

Wulan, Alexandra Retno. 2006. 'Intelijen: Masa Perang dan Masa Damai', dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies.

Yamin, Muhammad dan Matengkar, Sebastian. 2006. *Intelijen Indonesia: Towards Professional Intelligence*. Jakarta: IRSC dan LPPBHI.

Yani, Ahmad. 2011. *Pasang Surut Kinerja Legislasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yani, Yanyan Mochamad, Montratama, Ian dan Mahyudin, Emil. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Yuda, Dimas P. 2010. "Reformasi Sektor Keamanan Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review", *Indonesian Review RSK & Media* Vol. I: 41-54.

Yuliandri dkk. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan*

Perundang-Undangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Zakaria, Yahya dan Setyoko, Paulus Israwan. 2012. “Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi”, disampaikan sebagai *makalah* pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 10 Februari.

Zaqiu Rahman. 2015. Peran Sistem Pendukung (Supporting System) dalam Pembentukan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal Rechtsvinding* (http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PERAN%20SUPPORTING%20SYSTEM%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20UNDANG%203%20Juni%20%202015%20kirim.pdf).

Zen, A. Patra M. 2005. *Membedah Sesat Pikir RUU Rahasia Negara*. Jakarta: YLBHI.

_____. 2006. “Wewenang Penangkapan Intelijen Tidak Diperlukan!”, dalam Andi Widjajanto (ed), *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies.

Wawancara

Wawancara dengan Bhatara Ibnu Reza, Peneliti Senior Imparsial, pada 11 Mei 2018, di Jakarta Selatan

Wawancara dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR-RI 2010-2016, pada 28 Maret 2018, di Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Muhammad A.S. Hikam, Koordinator Kelompok Kerja RUU Intelijen Negara, Anggota dan Ketua Dewan Analisa Strategis-BIN 2010-2016, pada 10 Mei 2018, di Tangerang Selatan

Media Massa Cetak

Kompas, “Depkeh dan HAM Belum Terima RUU Intelijen”, 21 Februari 2003.

Kompas, “Tunda Pembahasan RUU Intelijen”, 26 September 2003.

Kompas, “Dephan Jadi Penjuru Pembahasan RUU Intelijen”, 25 Agustus 2005.

Kompas, “Intelijen Tetap Dibutuhkan Negara: Petugas Intel Bisa Mempertanyakan Tugasnya”, 9 September 2005.

Kompas, “Pasca-Bom Bali II: RUU Intelijen Akan Mulai Dibahas Tahun 2007”, 13 Oktober 2005.

Kompas, “RUU Intelijen: Kepala BIN: Naskah Sudah di Presiden”, 29 September 2006.

Kompas, ”Kementerian Pertahanan Salurkan Usulan Aktivistis”, 30 Juli 2011.

Koran Jakarta, “Peran BIN Harus Diperkuat”, 17 Maret 2011.

Majalah Sinergis, “Proses Panjang Penyusunan RUU Intelijen”, Edisi 006/Tahun I/2011.

Media Indonesia, “Menghindarkan Warga dari Kesewenangan-wenangan Negara”, 29 April 2011.

Media Indonesia, “RUU Intelijen Meniadakan Hak Sipil”, 7 September 2005.

Media Indonesia, “Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan Intelijen”, 12 Februari 2012.

Suara Pembaruan, “16 Pasal UU Intelijen Rawan Disalahgunakan”, 6 Januari 2012.

The Jakarta Post, “Govt, House Agree to Sign Intelligence Bill, 30 September 2011.

Media Massa Daring

Antara News. 2011. “Menkumham dan Komisi I Bahas RUU Intelijen”, 22 Maret (<https://www.antaraneews.com/berita/250856/menkumham-dan-komisi-i-bahas-ruu-intelijen>), diakses 22 Maret 2018.

Antara News. 2011. “RUU Intelijen, PDIP Tolak Pasal Penangkapan”, 29 Maret (<https://www.antaraneews.com/berita/251906/ruu-intelijen-pdip-tolak-pasal-penangkapan>), diakses 17 April 2018.

BBC Indonesia. 2006. “Hati-Hati Bahas RUU Intelijen”, 6 Desember (http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/12/printable/061206_asasisw.shtml), diakses 10 April 2018.

BBC Indonesia. 2012. “MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Intelijen”, 10 Oktober (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121010_mkuuintelijen), diakses 16 Mei 2018.

Berita Satu. 2011. “Kontras: Pembahasan RUU Intelijen Jangan Tertutup”, 29 Maret (www.beritasatu.com/home/kontras-pembahasan-ruu-intelijen-jangan-tertutup/8698), diakses 5 Maret 2018.

Berita Satu. 2011. “DPR Baru Mengesahkan Tujuh Undang-Undang”, 22 Juli (<http://www.beritasatu.com/nasional/9686-dpr-baru-mengesahkan-tujuh-undangundang.html>), diakses 22 Maret 2018.

Berita Satu. 2012. “16 Pasal Bermasalah UU Intelijen”, 6 Januari (www.beritasatu.com/politik/24676-16-pasal-bermasalah-uu-intelijen.html), diakses pada 7 Maret 2018.

CNN Indonesia. 2016. “Menteri Luhut Buka Peluang Revisi UU Intelijen”, 18 Januari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160118155530-32-105095/menteri-luhut-buka-peluang-revisi-uu-intelijen>), diakses 16 Mei 2018

Detik. 2004. “Dideportasi, Sidney Jones Minta Ketemu Kepala BIN, 2 Juni (<https://news.detik.com/berita/159832/dideportasi-sidney-jones-minta-ketemu-kepala-bin->), diakses 3 Mei 2018.

Detik. 2005. “RUU Intelijen Masuk Prolegnas 2006”, 23 November (<https://news.detik.com/berita/484974/ruu-intelijen-masuk-prolegnas-2006>), diakses 21 Maret 2018.

Detik. 2008. “Banyak Celanya, RUU Rahasia Negara Dikembalikan Saja”, 26 Mei (<https://news.detik.com/berita/945245/banyak-celanya-ruu-rahasia-negara-dikembalikan-saja>), diakses 21 Maret 2018.

Detik. 2009. “Banyak Interupsi, Prolegnas 2010 Disahkan Dengan Catatan”, 1 Desember (<https://news.detik.com/berita/d-1251906/banyak-interupsi-prolegnas-2010-disahkan-dengan-catatan>), diakses 21 Maret 2018.

Detik. 2011. “7 Kelemahan UU Intelijen versi Masyarakat” (www.detik.com/news/berita/1744050/7-kelemahan-uu-intelijen-versi-masyarakat), diakses 7 Maret 2018.

Detik. 2011. “12 Catatan Penting RUU Intelijen”, 28 Maret (<https://news.detik.com/berita/d-1603197/-12-catatan-penting-ruu-intelijen>) diakses 22 Maret 2018.

Detik. 2011. “Banyak Bias Persepsi, RUU Intelijen Belum akan Kelar Juli 2011”, 11 Mei (<https://news.detik.com/berita/1637365/banyak-bias-persepsi-ruu-intelijen-belum-akan-kelar-juli-2011?nd992203605>), diakses 22 Maret 2018.

Detik. 2011. “Tolak RUU Intelijen, Massa Bakar Draf RUU di Depan DPR”, 22 Juni (<https://news.detik.com/berita/d-1666359/tolak-ruu-intelijen-massa-bakar-draf-ruu-di-depan-dpr>), diakses 22 Maret 2018.

Detik. 2011. “Komisi I Ketok RUU Intelijen, Pasal Kewenangan Menangkap Dihilangkan”, 30 September (<https://news.detik.com/berita/1733650/komisi-i-ketok-ruu-intelijen-pasal-kewenangan-menangkap-dihilangkan>), diakses 22 Maret 2018.

Detik. 2011. “Priyo: RUU Intelijen Agar Kita Tidak Kecolongan Aksi Teror”, 30 September (<https://news.detik.com/berita/d-1734187/priyo-ruu-intelijen-agar-kita-tidak-kecolongan-aksi-teror>), diakses 22 April 2018.

Detik. 2011. “Presiden Sambut Baik Pengesahan UU Intelijen”, 11 Oktober (<https://news.detik.com/berita/1741501/-presiden-sambut-baik-pengesahan-uu-intelijen>), diakses 23 April 2018.

Deutsche Welle. 2011. “Bom Bunuh Diri di Solo”, 25 September (<http://www.dw.com/id/bom-bunuh-diri-di-solo/a-15414851>), diakses 22 April 2018.

Deutsche Welle. 2011. “DPR Sahkan UU Intelijen”, 11 Oktober (<https://www.voaindonesia.com/a/dpr-sahkan-uu-intelijen--131511353/99237.html>), diakses 23 April 2018.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI. 2010. “RUU Intelijen Butuh Kontribusi Publik”, 5 April (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/609-ruu-intelijen-butuh-kontribusi-publik.html>), diakses 15 April 2018.

ELSAM. 2011. “Siaran Pers Pengesahan RUU Intelijen Negara: Kembalinya Rezim Panopticon, yang Memata-matai Rakyat”, 11 Oktober (<http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=2&id=1629&cid=302&lang=in>), diakses 23 April 2018.

Human Rights Watch. 2005. “Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen: Suatu Ancaman Nasional?”, 3 Agustus (<https://www.hrw.org/id/news/2005/08/03/229810>), diakses 21 Maret 2018

JPNN. 2011. “RUU Intelijen Masih Sisakan 4 Masalah”, 18 Maret (<https://www.jpnn.com/news/ruu-intelijen-masih-sisakan-4-masalah>), diakses 22 Maret 2018.

JPNN. 2011. “Paripurna DPR Setujui Pengesahan RUU Intelijen”, 11 Oktober (<https://www.jpnn.com/news/paripurna-dpr-setujui-pengesahan-ruu-intelijen>), diakses 22 Maret 2018.

Kabar24. 2011. “UU Intelijen Negara Disahkan Secara Aklamasi” (<http://kabar24.bisnis.com/read/20111011/15/49394/uu-intelijen-negara-disahkan-secara-aklamasi>), diakses 1 Maret 2018.

Kompas.com. 2011. “DPR Diminta Transparan soal RUU Intelijen”, 11 September (<https://edukasi.kompas.com/read/2011/09/11/16230783/dpr.diminta.transparan.soal.ruu.intelijen>), diakses 22 Maret 2018.

Kompas.com. 2011. “Pengamat: Intelijen Tahu Rencana Teror Sejak Agustus”, 26 September (<https://nasional.kompas.com/read/2011/09/26/21225422/Pengamat.Intelijen.Tahu.Rencana.Teror.Sejak.Agustus>), diakses 19 Mei 2018.

Kompas.com. 2011. “Demo Anti RUU Intelijen Memanas di Semarang”, 11 Oktober (<https://regional.kompas.com/read/2011/10/11/12450868/demo.anti.ruu.intelijen.memanas.di.semarang>), diakses 22 Maret 2018.

Kompas.com 2012. “MK Tolak Pengujian UU Intelijen Negara”, 10 Oktober (<https://nasional.kompas.com/read/2012/10/10/21393372/MK.Tolak.Pengujian.UU.Intelijen.Negara>), diakses 16 Mei 2018.

Kompas.com. 2017. “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”, 19 Juli (<http://www.nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>), diakses 24 Juni 2018.

Kontan. 2011. “Siang Ini, DPR Bahas DIM RUU Intelijen”, 19 Mei (<http://nasional.kontan.co.id/news/siang-ini-dpr-bahas-dim-ruu-intelijen-1>), diakses 21 Maret 2018.

KontraS. 2011. “Siaran Pers: Libatkan Aspirasi Publik dalam RUU Intelijen Negara”, 14 Agustus (<https://www.kontras.org/home/index.php?id=1343&module=pers>), diakses 22 Maret 2018.

KontraS. 2011. “Siaran Pers Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara: RUU Intelijen Negara Belum Maksimal”, 30 September (<https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1379>), diakses 22 April 2018.

KontraS. 2011. “LSM Kritik Rencana Pengesahan RUU Intelijen”, 10 Oktober (<https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=5098>), diakses 22 Maret 2018.

Okezone. 2011. “UU Intelijen, antara subversif & kebebasan HAM”, 11 Oktober (<https://news.okezone.com/read/2011/10/11/448/513618/uu-intelijen-antara-subversif-kebebasan-ham>), diakses 22 Maret 2018.

Okezone. 2011. “BEM Bandung Raya Tolak RUU Intelijen”, 11 Oktober (<https://news.okezone.com/read/2011/10/11/373/513737/bem-bandung-raya-tolak-ruu-intelijen>), diakses 22 Maret 2018.

Parlementaria. 2011. “Komisi I DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Intelijen Negara”, 3 Oktober (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3185/t/javascript;>), diakses 21 Maret 2018.

Perspektif Baru. 2010. “Al Araf: UU Intelijen yang Menghormati HAM”, 31 Oktober (<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/762>), diakses 16 April 2018.

Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR-RI. 2017. “Profil – Bidang Politik, Hukum, dan HAM” (<http://pusatpuu.dpr.go.id/profil/index/id/4>), diakses 15 April 2018.

Republika. 2010. “RUU Intelijen Negara Bakal Dibahas, Banyak Pasal Kontroversial”, 17 Desember (<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/05/29/breaking-news/hukum/10/12/17/152712-ruu-intelejen-negara-bakal-dibahas-banyak-pasal-kontroversial>), diakses 21 Maret 2018.

Republika. 2011. “SBY Bahas RUU Keamanan Nasional dan Intelijen Negara”, 10 Maret (<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/10/168456-sby-bahas-ruu-keamanan-nasional-dan-intelejen-negara>), diakses 23 April 2018.

Republika. 2011. “Tjahjo Ingin Intelijen Nonpartisan”, 25 Maret (<http://republika.co.id/berita/nasional/umum/11/03/25/lilyc1-tjahjo-ingin-intelijen-nonpartisan>), diakses 17 April 2018.

RMOL.co. 2011. “Komisi I: RUU Intelijen Minus Kompromi dan Studi Banding”, 28 Juni (<http://www.rmol.co/read/2011/06/28/31458/Komisi-I:-RUU-Intelijen-Minus-Kompromi-dan-Studi-Banding->), diakses 22 Maret 2018.

RMOL.co. 2011. “Agus Gumiwang: Tak Boleh Ciptakan Monster dalam Bentuk RUU Intelijen”, 27 September (<http://www.rmol.co/read/2011/09/27/40608/Agus-Gumiwang:-Tak-Boleh-Ciptakan-Monster-Dalam-Bentuk-UU-Intelijen->), diakses 22 April 2018.

RMOL.co. 2011. “Tolak UU Intelijen”, 12 Oktober (<http://www.rmol.co/read/2011/10/12/42082/TOLAK-UU-INTELIJEN->), diakses 22 Maret 2018.

Tempo.co. 2003. “Secara Implisit, Wapres Tolak RUU Intelijen”, 28 Juli (<https://nasional.tempo.co/read/4477/secara-implisit-wapres-tolak-ruu-intelijen>), diakses 21 Maret 2018.

Tempo.co. 2008. “Intelijen Indonesia Dinilai Masih ‘Jadul’”, 5 Agustus (<https://nasional.tempo.co/read/129833/intelijen-indonesia-dinilai-masih-jadul>), diakses 21 Maret 2018.

Tempo.co. 2011. “DPR Didesak Undur Pengesahan RUU Intelijen”, 26 Maret (<https://nasional.tempo.co/read/323011/dpr-didesak-undur-pengesahan-ruu-intelijen>), diakses 17 April 2018.

Tempo.co. 2011. “Demokrat Setuju BIN Diberi Kewenangan Menangkap”, 27 Maret (<https://nasional.tempo.co/read/323130/demokrat-setuju-bin-diberi-kewenangan-menangkap>), diakses 17 April 2018.

Tempo.com. 2011. “PKS Tolak BIN Jadi Lembaga Koordinasi Intelijen Negara”, 31 Maret (<https://nasional.tempo.co/read/324163/pks-tolak-bin-jadi-lembaga-koordinasi-intelijen-negara>), diakses 16 April 2018.

Tempo.co. 2011. “PDIP Ingin BIN Koordinasikan Intelijen”, 31 Maret (<https://nasional.tempo.co/read/324179/pdip-ingin-bin-koordinasikan-intelijen>), diakses 17 April 2018.

Tempo.co. 2011. “Bom Makin Sering, BIN Minta RUU Intelijen Segera Disahkan”, 15 April (<https://nasional.tempo.co/read/327803/bom-makin-sering-bin-minta-ruu-intelijen-segera-disahkan>), diakses 22 Maret 2018.

Tempo.co. 2011. “DPR Prioritaskan Bahas RUU Intelijen Sebelum RUU Keamanan Nasional”, 4 Juli (<https://nasional.tempo.co/read/344711/dpr-prioritaskan-bahas-ruu-intelijen-sebelum-ruu-keamanan-nasional>), diakses 22 Maret 2018.

Tempo.co. 2011. “PDIP Desak Pembahasan Terbuka untuk RUU Intelijen”, 12 Juli (<https://nasional.tempo.co/read/346094/pdip-desak-pembahasan-terbuka-untuk-ruu-intelijen>), diakses 17 April 2018.

Tempo.co. 2014. “Pollycarpus Sebut Munir Target Ikan Besar”, 6 Desember (<https://nasional.tempo.co/read/626690/pollycarpus-sebut-munir-target-ikan-besar>), diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

Tribun News. 2010. “DPR Minta Masukan Pakar Soal Penyusunan RUU Intelijen”, 6 September (<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/06/dpr-minta-masukan-pakar-soal-penyusunan-ruu-intelejen>), diakses 21 Maret 2018.

Tribun News. 2011. “72 Tokoh Nasional Minta Pengesahan RUU Intelijen Ditunda”, 10 Juli (<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/07/10/72-tokoh-nasional-minta-pengesahan-ruu-intelijen-ditunda>), diakses 22 Maret 2018.

Tribun News. 2011. “Sidarto Danusubroto: RUU Intelijen dan Kamnas untuk Penguasa”, 17 Juli (<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/07/17/sidarto-danusubroto-ruu-intelijen-dan-kamnas-untuk-penguasa>), diakses 17 April 2018.

Tribun News. 2012. “Kontas Sayangkan MK Tolak Uji Materiil UU Intelijen”, 15 Oktober (<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/15/kontras-sayangkan-mk-tolak-uji-materiil-uu-intelijen?page=2>), diakses 16 Mei 2018.

Viva. 2011. “RUU Intelijen Ancam Kebebasan Pers”, 12 Mei (<https://www.viva.co.id/berita/politik/219956-ruu-intelijen-ancam-kebebasan-pers>), diakses 21 Maret 2018.

Viva. 2011. “RUU Intelijen, Ini Pasal yang Disepakati”, 26 September (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/250380-ruu-intelijen-ini-pasal-yang-disepakati>), diakses 22 Maret 2018.

Viva. 2011. “26 Oktober, Batas Akhir RUU Intelijen”, 28 September (<https://www.viva.co.id/berita/politik/250622-26-oktober-batas-akhir-ruu-intelijen>) diakses 22 Maret 2018.

Viva. 2011. “9 Tahun Terkatung, UU Intelijen Disahkan DPR”, 11 Oktober (<https://www.viva.co.id/berita/politik/254463-dpr-sahkan-uu-intelijen-dengan-suara-bulat>) diakses 23 April 2018.